

Ambivalensi Implementasi Neo-Ottomanisme dalam Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Israel (2009-2014)

Andraina Ary Fericandra

ABSTRACT

Neo-Ottomanism is the cultural factor constructing Turkey's foreign policy to support Palestine and be critical against Israel. At the same time, Turkey tries to maintain its bilateral relation with Israel. Turkey becomes inconsistent with Neo-Ottomanism. Neo-Ottomanism has limited space. The limitation of Neo-Ottomanism is described using the theoretical framework based on the criticism of Constructivist approach in International Relations that explain that material interest becomes the limit of culture in foreign policy. Israel has significant role for Turkey's foreign economic relation in three vital sectors: trade, investment, and tourism. Turkey's support to Palestine and its criticism against Israel have negative impacts on Turkey-Israel economic relation.

Keywords: Neo-Ottomanism, Constructivism, Culture, and Foreign Policy

Neo-Ottomanisme menjadi faktor kultural yang mengkonstruksi kebijakan luar negeri Turki untuk mendukung kedaulatan Palestina dan bersikap kritis terhadap Israel. Namun di sisi lain, terdapat upaya Turki untuk mempertahankan hubungan bilateral dengan Israel. Akibatnya, sikap Turki pada Neo-Ottomanisme menjadi tidak konsisten, sehingga bisa dikatakan bahwa Neo-Ottomanisme mengalami keterbatasan ruang gerak. Keterbatasan implementasi Neo-Ottomanisme ini dijelaskan menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan kritik terhadap pendekatan konstruktivisme dalam Hubungan Internasional yang menunjukkan bahwa kepentingan material menjadi faktor yang membatasi implementasi kultur dalam kebijakan luar negeri. Israel memiliki arti penting bagi hubungan ekonomi luar negeri Turki di tiga sektor vital, yakni perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dukungan Turki terhadap Palestina dan sikap keras terhadap Israel menimbulkan konsekuensi negatif pada hubungan kerja sama ekonomi Turki dengan Israel.

Kata-kata Kunci: Neo-Ottomanisme, Konstruktivisme, Kultur, dan Kebijakan Luar Negeri

Berbagai literatur akademis mengasosiasikan Neo-Ottomanisme pemikiran dan doktrin kebijakan luar negeri Ahmet Davutolu yang tertulis dalam buku "Strategic Depth". Davutolu memiliki gagasan bahwa Turki memiliki posisi geografis yang strategis dan kekayaan warisan historis Kekaisaran Ottoman, sehingga Turki seharusnya meningkatkan peran dan pengaruh di kancah internasional, terutama dengan negara-negara bekas wilayah Kekaisaran Ottoman, seperti Timur Tengah, Balkan, dan Asia Tengah (Gullo 2012). Davutolu juga menyatakan bahwa Turki memiliki potensi untuk kembali menjadi "Muslim super power" sebagaimana Kekaisaran Ottoman (Gullo 2012). Dengan pemikiran Neo-Ottomanisme, Davutolu yang menjadi Menteri Luar Negeri Turki sejak tahun 2009 mengkonstruksi kebijakan luar negeri Turki dengan membentuk visi dan menyediakan kerangka implementasi kebijakan luar negeri, salah satunya kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah (Aras 2009). Salah satu fokus utama kebijakan luar negeri Neo-Ottomanisme Turki di Timur Tengah adalah posisi Turki pada konflik Israel-Palestina. Secara historis, Palestina merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, sehingga Turki melihat Palestina sebagai salah satu warisan Kekaisaran Ottoman. Untuk itu, sebagai implementasi Neo-Ottomanisme, Pemerintah Turki menempatkan isu Palestina sebagai bagian dari tanggung jawab utama dalam kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah (Stein 2014).

Dengan menempatkan isu Palestina sebagai tanggung jawab utama, Pemerintah Turki aktif dalam mendukung perjuangan Palestina untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat di PBB, membangun hubungan diplomatik dan aktif melakukan dialog dengan Hamas, serta mengkritisi aksi-aksi Israel di Palestina. Hal ini terlihat dari beberapa kritik, seperti pada tahun 2009 dalam Davos World Economic Forum yang mana Erdogan menyebut operasi Israel di Gaza sebagai kejahatan kemanusiaan (Slot 2013). Sikap kritis Turki terhadap Israel mencapai titik terburuk setelah terjadi insiden Mavi Marmara, kapal Turki yang mengangkut bantuan kemanusiaan untuk Gaza pada 31 Mei 2010. Insiden ini pun mengakibatkan penarikan duta besar Turki dari Israel dan penurunan hubungan bilateral kedua negara hampir di semua sektor, termasuk pembatalan kerja sama ekonomi dan pertahanan (Slot 2013).

Pemerintah Turki mengajukan tiga tuntutan terhadap Israel sebagai prasyarat untuk menormalisasi hubungan, yang disampaikan Erdogan dalam Majelis Umum PBB 2011: "Israel must apologize and compensate for the deaths of our martyrs and lift the economic blockade on Gaza" (Slot 2013). Kemudian pada tahun 2013 terdapat upaya normalisasi hubungan kedua negara, yang diawali oleh permintaan maaf Israel kepada Turki. Pemerintah Turki memberi respon positif dengan secara resmi menerima permintaan maaf Israel dan menyayangkan hubungan kedua negara yang memburuk (CNN News 2013). Respon Erdogan terhadap Israel pasca insiden Mavi Marmara mengindikasikan suatu ambivalensi. Di satu sisi, Turki menunjukkan identitas yang pro-Dunia Islam melalui sikap kritis terhadap aksi Israel. Namun di sisi lain, ada upaya untuk membina kembali relasi dengan Israel. Aplikasi Neo-Ottomanisme yang ambivalen dan bisa dikatakan terbatas terhadap hubungan Turki dan Israel menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor spesifik yang membatasi ruang gerak implementasi Neo-Ottomanisme. Tulisan ini membahas faktor apa yang membatasi implementasi Neo-Ottomanisme dalam hubungan Turki dengan Israel pada era Erdogan 2009-2014.

Identitas dan Kebijakan Luar Negeri, Kritik terhadap Konstruktivisme, serta Tinjauan Kasus Empiris

Sejak abad ke-20, faktor-faktor kultural menjadi variabel penting untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara (Shaffer 2006; Ehin dan Berg 2009). Hal ini dikarenakan kultur tidak dapat terlepas dari manusia sebagai aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan yang mewakili seluruh rakyat dari suatu negara. Dalam buku yang berjudul "The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy", Shaffer (2006) mendefinisikan kultur sebagai faktor yang membentuk identitas rakyat suatu negara secara kolektif, yang meliputi faktor-faktor kepentingan non-materi, seperti agama, etnis, sejarah, peradaban, dan ideologi. Sedangkan menurut Fischer (t.t., dalam Shaffer 2006), para ilmuwan hubungan internasional mendefinisikan kultur sebagai segala bentuk pola pikir yang mengkonstruksi realitas sosial-politik, termasuk identitas dan ideologi.

Klaim terkait pengaruh faktor kultur dan identitas baik dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan luar negeri berangkat dari pendekatan konstruktivisme yang muncul pada awal tahun 1990-an setelah Perang Dingin berakhir. Konstruktivisme menegaskan bahwa seluruh aktivitas dan interaksi manusia tidak hanya dibentuk oleh faktor material, namun juga faktor kultural bersama yang kemudian mengkonstruksi kepentingan dan kebijakan negara (Finnemore dan Sikkink 2001). Kemudian Hopf (1998) juga menyebutkan bahwa fungsi identitas adalah untuk membedakan antara "Self" dan "Other" yang menunjukkan preferensi dan kepentingan negara, serta mendasari perilaku negara untuk mencapai kepentingan.

Pandangan Konstruktivisme terkait klaim peran kultur dalam kebijakan luar negeri pun menuai kritik. Sekalipun kultur dan identitas berpengaruh dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri, namun dibatasi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor material. Menurut Shaffer (2006), kultur dan kepentingan material merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, namun juga tidak selalu dalam hubungan yang konvergen. Dalam beberapa kasus, kepentingan kultural justru seringkali berbenturan dengan kepentingan material, sehingga negara mengalami dilema kebijakan dan harus menentukan apakah kepentingan kultural atau material yang menjadi prioritas utama (Shaffer 2006). Apabila kultur merupakan faktor utama dalam kebijakan luar negeri suatu negara, pembuat kebijakan akan lebih memprioritaskan kepentingan kultural meskipun merugikan negara secara material. Sebaliknya, pengaruh kultur dalam kebijakan luar negeri dikatakan terbatas oleh faktor kepentingan material ketika negara mengesampingkan aspek kultural demi mengejar kepentingan material (Altorai 2012). Oleh karena itu, faktor kepentingan material mengakibatkan batasan seperti kontradiksi antara pilihan kebijakan dan aliansi politik dengan kultur resmi negara, serta batasan peran kultur sebagai alat atau cara (*culture as means*) bagi negara untuk mencapai kepentingan material (Fischer t.t., dalam Shaffer 2006). Kedua, faktor historis. Faktor historis membatasi pengaruh kultur dalam kebijakan luar negeri mengakibatkan negara mendefinisikan "Self" dan "Other" berdasarkan pada persamaan pengalaman historis.

Dengan kata lain, negara menempatkan faktor historis sebagai landasan utama untuk membentuk pilihan aliansi kerja sama dan persepsi ancaman terhadap negara lain, terlepas dari faktor persamaan kultur maupun agama (Shaffer 2006). Ketiga, faktor sistemik atau eksternal. Menurut Blum (t.t., dalam Shaffer 2006), faktor eksternal, seperti fenomena globalisasi atau institusi internasional, mengakibatkan negara melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan pada norma internasional. Pengaruh kultur dan identitas dalam kebijakan luar negeri terbatas oleh tekanan eksternal terutama jika negara mengejar keanggotaan suatu institusi internasional, karena negara harus patuh pada persyaratan dan norma yang ada dalam institusi. Aplikasi identitas negara pun terbatas apabila kontradiktif terhadap konstruksi identitas dan praktik sosial yang lebih fundamental dalam level internasional.

Pertumbuhan Ekonomi Turki dan Arti Penting Israel bagi Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turki

Sejak Turki melakukan liberalisasi ekonomi berorientasi ekspor pada tahun 1980-an, perekonomian Turki mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kebijakan orientasi ekspor membuat Turki tidak hanya mandiri, tetapi juga ekspansif. Setengah dari nilai ekspor Turki memang masih mengandalkan negara-negara Eropa, namun nilai perdagangan Turki dengan negara-negara Timur Tengah juga tumbuh pesat (Alfian 2015). Meskipun sempat mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, perekonomian Turki kembali bangkit secara drastis di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Erdogan dan Pemerintah AKP. Sepanjang tahun 2002-2007, perekonomian Turki kembali meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 6-7% per tahun, nilai ekspor pun melonjak tinggi yakni dari 32 milyar dolar AS pada tahun 2002 menjadi 102 milyar dolar pada tahun 2009 (Alfian 2015). Bahkan pada tahun 2014, menurut World Bank (t.t.), pertumbuhan ekonomi yang tinggi menempatkan Turki sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-17 dunia dengan GDP mencapai 799,54 milyar dolar AS dan pendapatan per kapita sebesar 10.500 dolar AS. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh Turki dari kegiatan perdagangan luar negeri, investasi, dan pariwisata. Oleh karena itu, ketiga sektor vital ini berperan penting untuk kelangsungan perekonomian nasional Turki.

Di sektor perdagangan, perdagangan luar negeri Turki di era Erdogan, yakni ekspor dan impor, meningkat secara cepat dan angka pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekspor sangat tinggi. Berdasarkan data dari Investment Support and Promotion Agency of The Republic of Turkey Prime Ministry (t.t.), nilai ekspor Turki pada kurun waktu antara 2009-2014 di era Erdogan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama 2012 mencapai lebih dari 152 milyar dolar AS dan terus meningkat mencapai titik tertinggi pada tahun 2014 dengan total ekspor sebesar lebih dari 157 milyar dolar AS. Nilai ekspor yang tinggi ini berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi Turki.

Pertumbuhan ekonomi Turki tidak terlepas dari perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Turki dengan Israel. Secara historis, sejak tahun 1990-an Israel merupakan salah satu negara mitra yang penting bagi Turki dalam sektor perdagangan. Hal ini terbukti dari pembentukan Turkey-Israel Business Council pada tahun 1993. Bahkan Israel dan Turki menandatangani kerja sama perdagangan bebas sejak 14 Maret 1996 dan berlaku sampai sekarang (Bozdaglioglu, 2003). Turki dan Israel juga menandatangani perjanjian-perjanjian lain untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara selama tahun 1990-an, antara lain Commercial, Economic, Industrial, Technical, and Scientific Cooperation Agreement, Custom Agreement, Double-Taxation Prevention Treaty, dan Bilateral Investment Treaty, Standardization and Harmonization Agreement serta berbagai perjanjian dan pertemuan lainnya yang mendukung kerja sama perdagangan kedua negara (Uiportal 2013).

Kemudian di era kepemimpinan Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki di periode kedua (2009-2014), Israel tetap menjadi salah satu target pasar yang strategis bagi perdagangan luar negeri Turki. Menurut data yang dirilis oleh Turkiye Istatistik Kurumu atau Institusi Statistik Turki (2015), angka pendapatan ekspor Turki ke Israel selama tahun 2009-2014 sangat tinggi, sehingga Israel selalu masuk dalam daftar 20 besar negara tujuan ekspor utama yang memberi pendapatan ekspor tertinggi bagi Turki. Posisi ini juga menempatkan Israel dalam enam besar negara di kawasan Timur Tengah yang memberi pendapatan ekspor tertinggi bagi Turki. Adapun komoditas ekspor utama dari Turki ke Israel antara lain besi dan baja kendaraan bermotor peralatan elektronik, dan biji-bijian (Trade Map 2015). Selain mengekspor komoditas ke Israel, Turki

juga mengimpor beberapa komoditas dari Israel. Adapun komoditas yang diimpor Turki dari Israel didominasi oleh komoditas bahan bakar dan manufaktur (Trade Map 2015). Komoditas bahan bakar dan manufaktur ini memiliki peran penting bagi proses produksi Turki, mengingat pertumbuhan ekonomi Turki yang berorientasi ekspor. Nilai ekspor dan impor yang tinggi menyebabkan volume perdagangan bilateral Turki dan Israel yang tinggi pula selama periode 2009-2014. Bahkan volume perdagangan Turki dan Israel meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu lima tahun, yakni dari 2,59 milyar dolar AS pada tahun 2009 menjadi 5,83 milyar dolar AS pada tahun 2014 (TurkStat 2015c).

Secara kualitatif, Israel juga memiliki arti penting dan strategis bagi perdagangan Turki. Berbeda dengan negara-negara mitra dagang Turki di Timur Tengah, komoditas ekspor Turki ke Israel memiliki diversifikasi yang tinggi dan letak geografis kedua negara yang berdekatan memudahkan para produsen Turki memasok komoditas ke Israel (Punsmann 2011). Turki juga diuntungkan dari kebijakan perdagangan Israel untuk mengurangi bea masuk yang berasal dari negara ketiga dalam perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan NAFTA. Menurut Turkey-Israel Business Council, saat ini terdapat sekitar 900 perusahaan Israel yang beroperasi di Turki maupun bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Turki, yang mana kerja sama ini dimanfaatkan Turki sebagai celah untuk memudahkan komoditas Turki masuk ke pasar Eropa dan Amerika Serikat, karena Israel memiliki kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan NAFTA. Tercatat sekitar 35% komoditas integrasi Israel dan Turki bisa masuk ke pasar Amerika Serikat tanpa pajak (Punsmann 2011). Lebih lanjut, kapasitas inovasi dan teknologi Israel juga berperan penting bagi perekonomian Turki. Menurut data yang dirilis TurkStat, pada tahun 2009-2014 struktur impor jasa Turki dari Israel didominasi oleh sektor layanan di bidang komputer, informasi, dan komunikasi, yakni dengan nilai rata-rata 46,7% dari total nilai impor jasa Turki dari Israel (TurkStat 2015c). Banyak perusahaan Israel yang memiliki spesialisasi tinggi di bidang riset dan pembangunan menjadikan Turki sebagai mitra untuk mengembangkan produk baru dan teknologi terkini. Israel pun menyediakan akses teknologi bagi perekonomian Turki, mulai dari perangkat lunak komputer dan telepon selular, sistem irigasi air, teknologi informasi, hingga peralatan medis (Punsmann 2011).

Di sektor investasi, selama era Erdogan nilai investasi asing langsung yang masuk ke Turki per tahun menunjukkan angka yang tinggi. Terbukti menurut Kementerian Ekonomi Turki (2014), pada tahun 2014 Turki menerima FDI inflows sebesar 12,1 milyar dolar AS, sehingga menempatkan Turki sebagai negara penerima FDI tertinggi ke-22 dunia, serta sebagai negara penerima FDI tertinggi dibanding negara-negara di kawasan Asia Barat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Turki untuk menarik para investor asing dari berbagai negara melalui penandatanganan perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs). Tujuan utama dari BITs adalah untuk menstimulasi aliran kapital dan teknologi dengan pihak-pihak yang meratifikasi BITs, yakni dengan menyediakan dan menjamin lingkungan yang stabil dan kondusif bagi para investor yang berinvestasi di dalam negeri, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di antara pihak investor dan negara penerima. Hingga tahun 2014, tercatat bahwa Turki telah menandatangani dan meratifikasi BITs dengan 75 negara, salah satunya adalah Israel. Israel telah meratifikasi BITs dengan Turki sejak 27 Agustus 1998 (Kementerian Ekonomi Turki 2014).

Dengan meratifikasi BITs, kerja sama investasi antara Turki dan Israel mulai diimplementasikan, antara lain dengan penanaman investasi yang dilakukan Israel di Turki sejak tahun 2000-an. Sementara itu, selama tahun 2009-2014 tercatat nilai investasi Israel di Turki cukup tinggi, sehingga menempatkan Israel di posisi ke-6 sebagai investor tertinggi bagi Turki dibandingkan negara-negara di seluruh Asia, yakni setelah Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jepang, Kuwait, dan Korea Selatan, atau di posisi ke-4 tertinggi dibandingkan negara-negara di kawasan Timur Tengah (TurkStat 2015e). Investasi Israel di Turki ditanamkan di berbagai sektor industri, antara lain sektor energi, perbankan, dan manufaktur. Terlebih Israel juga memiliki arti penting terkait aliran modal asing ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Turki. Berdasarkan data dari Kementerian Ekonomi Turki (2015), hingga tahun 2014 tercatat lebih dari 39.100 perusahaan dengan modal asing beroperasi di Turki, yang mana 322 perusahaan di antaranya memperoleh aliran modal asing dari Israel. Mayoritas perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan grosir dan sektor manufaktur strategis yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi Turki, seperti manufaktur kimia, peralatan mesin, dan pertambangan (Central Bank of Turkey 2015).

Sektor-sektor manufaktur ini menjadi basis dari proses produksi Turki, sehingga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Turki yang berorientasi ekspor. Sedangkan investasi Turki di Israel, salah satunya dilakukan oleh perusahaan energi Turki, Zorlu Group. Zorlu Group merupakan investor terbesar dalam proyek gas alam di Israel dengan nilai investasi 1,3 milyar dolar AS di proyek gas alam Ashkelon sejak tahun 2003 (Zorlu t.t.).

Di sektor pariwisata, pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi Turki karena berkontribusi besar bagi peningkatan GDP dan lapangan kerja. Hal ini terbukti dari data yang dipublikasikan oleh Investment Support and Promotion Agency Turki (2014) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 pendapatan dari sektor pariwisata (sekitar 30 milyar dolar AS) memberi kontribusi GDP tertinggi kedua setelah sektor pelayanan keuangan, dan lebih tinggi daripada sektor-sektor industri lain, seperti manufaktur otomotif, pelayanan komunikasi, pertambangan, pendidikan, dan manufaktur kimia. Sektor pariwisata juga menciptakan sekitar 510.000 lapangan kerja atau 9% dari total lapangan kerja yang ada di Turki. Menurut data yang dirilis oleh TurkStat (2015d), total pendapatan yang diperoleh Turki dari sektor pariwisata terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2009-2014, yakni dari 19,6 milyar dolar AS pada tahun 2009 menjadi 25,3 milyar dolar AS pada tahun 2014. Rata-rata 74% dari total pendapatan tahun 2009-2014 ini diperoleh dari wisatawan asing, sehingga peran wisatawan asing sangat penting bagi pendapatan sektor pariwisata Turki. Untuk itu, Turki menjalin kerja sama pariwisata dengan berbagai negara, termasuk dengan Israel.

Kerja sama pariwisata antara Turki dan Israel telah ada sejak tahun 1992 (Bozdaglioglu 2003) dan terus berlanjut hingga di era Erdogan. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Turki (t.t.), Israel menjadi satu dari 66 negara yang diberi kebebasan visa kunjungan selama 90 hari oleh Pemerintah Turki. Pendapatan pariwisata Turki dari wisatawan Israel selama tahun 2009 hingga 2014 pun tinggi. TurkStat (2015d) mencatat bahwa pada tahun 2014 jumlah wisatawan Israel meningkat drastis sejak penurunan yang terjadi pada tahun 2010, sehingga pendapatan yang diperoleh Turki dari wisatawan Israel di tahun 2014 pun meningkat sekitar empat kali lipat dari pendapatan tahun 2011, yakni dengan angka lebih dari 250 juta dolar AS.

Selain itu, jumlah wisatawan Israel yang kembali meningkat menyebabkan peningkatan jumlah penerbangan dengan rute dari Tel Aviv menuju beberapa kota tujuan wisata di Turki, yakni dari 1.677 penerbangan di tahun 2012 menjadi 2.253 di tahun 2013 (TurkStat 2015b), yang mana angka ini juga berdampak positif bagi industri penerbangan Turki.

Neo-Ottomanisme dan Konsekuensinya terhadap Hubungan Ekonomi Turki-Israel

Neo-Ottomanisme yang mendasari kebijakan Pemerintah Turki untuk mendukung Palestina berdampak pada penurunan hubungan bilateral Turki-Israel, terutama setelah terjadi insiden Mavi Marmara pada tahun 2010 yang menyebabkan Turki menarik duta besar dari Tel Aviv. Sikap kritis Turki terhadap Israel dan insiden Mavi Marmara juga berdampak pada penurunan kerja sama ekonomi luar negeri antara Turki dan Israel. Penurunan kerja sama ekonomi luar negeri kedua negara terbukti dari data statistik yang dirilis oleh TurkStat, yakni terjadi pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Di sektor perdagangan, meskipun pasca insiden Mavi Marmara 2010 angka perdagangan kedua negara tidak terdampak secara langsung, namun volume perdagangan luar negeri Turki dan Israel mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan sikap kritis Turki terhadap Israel terus berlanjut sehingga menyebabkan eskalasi tensi hubungan kedua negara. Pada tahun 2011, Pemerintah Turki memulangkan duta besar Israel di Ankara, Gabby Levy, menurunkan tingkat perwakilan diplomatik sampai tingkat sekretaris dua, serta membatalkan secara total kerja sama dengan Israel di bidang ekonomi dan militer (BBC News 2011; VOA News 2011). Akibatnya, volume perdagangan kedua negara menurun hingga 400 juta dolar AS dalam kurun satu tahun, yakni dari 4,44 milyar dolar AS pada tahun 2011 menjadi 4,03 milyar dolar AS pada tahun 2012, yang mana penurunan angka ini mayoritas terjadi di sektor industri bahan-bahan kimia (TurkStat 2015c).

Di sektor investasi, akibat sikap kritis Turki terhadap Israel dan insiden Mavi Marmara pada tahun 2010, nilai investasi Israel di Turki menurun drastis dari 997 juta dolar AS pada tahun 2010 menjadi hanya sebesar 427 juta dolar AS pada tahun 2011. Penurunan investasi Israel ini antara lain terjadi di sektor pertambangan minyak sebesar 13% dan sektor perbankan sebesar 11% (Bryant dan Peker 2011). Menashe Carmon, ketua Turkish-Israeli Business Council, mengatakan bahwa krisis hubungan diplomatik Turki dan Israel menyebabkan para investor Israel berpikir ulang atau bahkan menunda keputusan untuk berinvestasi dan mendirikan usaha bersama jangka panjang di Turki (Setrakian 2011). Selain itu, investasi Turki di Israel juga terdampak oleh insiden Mavi Marmara. Misalnya, Zorlu Group yang mengurangi aktivitas dan operasi dalam proyek gas alam di Israel karena tekanan dan sensitivitas masyarakat sipil, kemudian Yilmazlar Construction Group, perusahaan Turki yang bergerak dalam bidang konstruksi di Israel sejak tahun 1993 dan telah mempekerjakan 700 tenaga kerja Israel, mengklaim bahwa aset-aset perusahaan sebesar jutaan dolar AS dibekukan oleh pengadilan Israel sebagai dampak dari tensi politik kedua negara (Cagaptay dan Evans 2012).

Di sektor pariwisata, industri pariwisata menjadi sektor ekonomi yang paling rentan terdampak oleh krisis hubungan diplomatik Turki dan Israel. Hal ini terbukti dari sikap kritis Pemerintah Turki terhadap Israel sejak tahun 2009 yang memunculkan sentimen negatif berupa penurunan kunjungan wisatawan Israel ke Turki, yakni dari angka 558.183 wisatawan pada tahun 2008, berkurang menjadi 316.466 wisatawan pada tahun 2009 (TurkStat 2015d). Kemudian saat terjadi krisis hubungan diplomatik antara Turki dan Israel, yakni setelah insiden Mavi Marmara 2010, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan travel warning yang mengakibatkan jumlah wisatawan Israel yang berkunjung ke Turki semakin berkurang, yakni dari 110.322 wisatawan pada tahun 2010 menjadi 79.420 wisatawan pada tahun 2011. Kunjungan wisatawan Israel ke Turki yang berkurang pun berdampak pada penurunan pendapatan wisata yang diperoleh Turki dari wisatawan Israel, yakni dari 120 juta dolar AS pada tahun 2009 menjadi hanya 61 juta dolar AS pada tahun 2011 (TurkStat 2015d).

Respon Kelompok Bisnis, Investor, dan Industri Pariwisata di Turki

Sejak terjadi insiden Mavi Marmara, para pelaku bisnis melalui Turkish-Israeli Business Council berusaha melobi Pemerintah Turki untuk melakukan rekonsiliasi dengan Israel. Hal ini dikarenakan potensi penurunan kerja sama ekonomi kedua negara dalam jangka panjang, merujuk pada keputusan para investor Israel yang membatalkan rencana investasi di Turki (Setrakian 2011). Respon dan protes terhadap Pemerintah Turki juga muncul dari beberapa perusahaan yang terdampak oleh krisis hubungan Turki dan Israel, seperti Yilmazlar Construction Group di Israel yang menyalahkan dan menuntut Pemerintah Turki akibat kerugian bisnis yang dialami (Cagaptay dan Evans 2012). Kemudian pada tahun 2012, kelompok investor dari Asosiasi Industri dan Bisnis Turki (TUSIAD) merespon kebijakan Turki terhadap Israel dengan menggelar pertemuan untuk mendiskusikan rencana investasi strategis Turki ke depan, mengingat nilai investasi dari Israel pada tahun 2011 merosot drastis, serta menyatakan bahwa Israel merupakan mitra investasi prioritas bagi para investor Turki (Yinanc 2012).

Protes juga muncul dari agen-agen perjalanan dan industri perhotelan yang menyalahkan Pemerintah Turki terkait penurunan jumlah kunjungan wisatawan Israel ke Turki sebagai dampak dari sikap keras Turki terhadap Israel, yang menyebabkan beberapa agen perjalanan dan hotel mengalami kebangkrutan. Misalnya, Levantin Tour mengklaim telah rugi hingga 1,1 juta dolar AS karena hampir 17.000 wisatawan Israel membatalkan reservasi hotel dan perjalanan ke Turki setelah insiden Mavi Marmara (Gokce 2010). Kondisi ini juga merugikan maskapai penerbangan Turki, Turkish Airlines, yang membatalkan seluruh penerbangan dengan rute Tel Aviv-Antalya karena tidak ada permintaan dari wisatawan Israel selama musim panas 2011 (Cagaptay dan Evans 2012).

Dilema Kebijakan dan Inkonsistensi Pemerintah Turki pada Neo-Ottomanisme

Profil yang mendemonstrasikan konsekuensi ekonomi yang terjadi di saat mengejar kepentingan kultural membuat Pemerintah Turki mengalami dilema kebijakan, yakni harus menentukan prioritas apakah kepentingan ekonomi atau kepentingan kultural.

Dilema kebijakan ini kemudian menyebabkan sikap dan pilihan kebijakan Pemerintah Turki menjadi tidak konsisten pada Neo-Ottomanisme. Inkonsistensi Pemerintah Turki pada Neo-Ottomanisme secara jelas terlihat dalam hubungan kerja sama ekonomi dengan Israel. Sejak terjadi penurunan nilai investasi secara drastis pada tahun 2011 dan protes dari berbagai kelompok pelaku ekonomi di Turki, Pemerintah Turki melakukan upaya-upaya verbal untuk mempertahankan dan meningkatkan kembali hubungan ekonomi dengan Israel, yakni dengan menegaskan arti penting Israel bagi Perekonomian Turki, serta bahwa Pemerintah Turki tidak memutuskan kerja sama ekonomi dengan Israel. Upaya verbal itu disampaikan ketika pihak Pemerintah Turki mengoreksi pernyataan Erdogan untuk membekukan kerja sama ekonomi dan militer dengan Israel pada tahun 2011, dengan mengumumkan bahwa sanksi Turki terhadap Israel hanya merujuk pada perdagangan yang berhubungan dengan militer dan pertahanan, sedangkan kerja sama perdagangan lainnya tidak dibekukan (Ravid 2011). Selain itu, Menteri Ekonomi Turki Zafer Çaglayan menyatakan bahwa Israel adalah mitra dagang yang penting bagi Turki, sehingga Pemerintah Turki tidak membatalkan kerja sama ekonomi dengan Israel (Bryant dan Peker 2011).

Di sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata Turki berupaya untuk meningkatkan kembali angka kunjungan wisatawan Israel ke Turki, yang disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Turki Ertugrul Günay dengan menyatakan bahwa wisatawan Israel akan tetap disambut di Turki (AK Parti t.t.). Kemudian Wakil Menteri Pariwisata Turki Özgür Özaslan juga menyampaikan bahwa Turki berharap para wisatawan Israel akan kembali berkunjung ke Turki (Eichner 2012).

Kendatipun upaya-upaya verbal telah dilakukan oleh para pejabat tinggi Pemerintah Turki, namun upaya ini belum menghasilkan peningkatan yang signifikan pada kerja sama ekonomi Turki dengan Israel. Pada tahun 2012, volume perdagangan luar negeri Turki dengan Israel justru merosot hingga 400 juta dolar AS. Akhirnya, sikap keras Turki terhadap Israel semakin melunak pada tahun 2013 yang terlihat dalam upaya normalisasi hubungan kedua negara.

Upaya normalisasi ini berawal pada 22 Maret 2013 ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi meminta maaf kepada Perdana Menteri Erdogan atas insiden Mavi Marmara serta menyetujui untuk segera menyelesaikan pembayaran kompensasi sebagai pemenuhan syarat normalisasi pertama dan kedua yang diajukan oleh Turki. Permintaan maaf Israel pun memperoleh respon positif dari Pemerintah Turki, yang mana Erdogan secara resmi menerima permintaan maaf Israel dan menyayangkan hubungan kedua negara yang memburuk. Erdogan menegaskan arti penting persahabatan dan kerja sama yang kuat selama berabad-abad antara rakyat Turki dan Israel (Prime Ministry Press Center of the Republic of Turkey 2013).

Pemerintah Turki pun telah menyetujui untuk bekerja sama dengan Israel dalam memperbaiki situasi kemanusiaan di wilayah Palestina sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan normalisasi ketiga. Pemerintah Turki juga sepakat untuk segera menormalisasi hubungan dengan Israel secara penuh, serta membatalkan tuntutan hukum terhadap para tentara Israel dan semua pihak pejabat Israel yang terlibat dalam serangan Mavi Marmara (Cohen, 2014). Padahal sejak 2010, melalui Palmer Report di PBB, Turki bersikeras menuntut Israel untuk bertanggung jawab secara hukum atas serangan Mavi Marmara. Sikap kompromi Turki terhadap Israel dan kesepakatan kedua negara untuk segera melakukan normalisasi secara penuh mengindikasikan bahwa sikap Turki yang pro-Palestina melunak.

Faktor ekonomi bisa dikatakan sebagai faktor yang melatarbelakangi kebijakan Turki untuk mengurangi sikap keras terhadap Israel. Terbukti upaya normalisasi yang dilakukan oleh Turki dan Israel akhirnya menuai hasil yang signifikan bagi hubungan ekonomi kedua negara. Keberhasilan upaya kedua negara ini terindikasi dari kontinuitas eksistensi dan peningkatan kembali kerja sama ekonomi luar negeri antara Turki dan Israel. Pada tahun 2013 tercatat volume perdagangan Turki dan Israel, nilai investasi Israel di Turki, dan angka wisatawan Israel yang berkunjung ke Turki kembali melonjak tinggi, masing-masing meningkat hingga 100% (TurkStat 2015c).

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kepentingan material Turki terhadap Israel dalam konteks ekonomi membatasi implementasi Neo-Ottomanisme sebagai faktor kultural dalam kebijakan luar negeri Turki di era Erdogan periode 2009-2014. Faktor ekonomi membatasi implementasi Neo-Ottomanisme ketika Pemerintah Turki dihadapkan pada pilihan dilematis antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural, yang mana pada akhirnya Pemerintah Turki mengesampingkan aspek kultural demi mempertahankan kepentingan ekonomi. Kondisi ini menjadi alasan Turki bersikap tidak konsisten pada Neo-Ottomanisme. Inkonsistensi Turki pada Neo-Ottomanisme ini dikarenakan Turki mengkalkulasi keuntungan material dari kerja sama ekonomi dengan Israel lebih besar dibandingkan mengejar kepentingan kultural berupa sikap pro-Palestina. Oleh karena itu, Turki mengambil pilihan kebijakan yang kontradiktif terhadap Neo-Ottomanisme, yakni dengan tetap mempertahankan hubungan bilateral dengan Israel dalam bidang kerja sama ekonomi di sektor perdagangan luar negeri, investasi, dan pariwisata. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa terjadi keterbatasan implementasi Neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri Turki karena faktor kepentingan ekonomi Turki terhadap Israel.

Daftar Pustaka

- AK Parti, 2011. Tourism is a Peace Project. [daring]. dalam <https://www.akparti.org.tr/english/haberler/tourism-is-a-peace-project/12712#1> [diakses pada 23 Maret 2016].
- Altoraifi, Adel, 2012. Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision Making: The Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement (1997-2009). Ph.D. London: London School of Economics and Political Science.
- Aras, Bulent, 2009. "Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy", SETA Policy Brief, No. 32, hal 1-16.
- BBC News, 2011. "Turkey Expels Israeli Ambassador over Gaza Flotilla Row", BBC News, 2 September 2011. [onlinedaring] dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-14762475> [diakses pada 18 Maret 2016].
- Blum, Douglas W., t.t. "Beyond Blood and Belief: Culture and Foreign Policy Conduct", dalam Shaffer, Brenda (ed.), 2006. The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy. Cambridge: The MIT Press. Ch.3.
- Bozdaglioglu, Yucel, 2003. Turkish Foreign Policy and Turkish Identity. London: Routledge.
- Bryant, Steve dan Peker, Emre, 2011. Turkey-Israel Booming Trade Obscured in Erdogan Political Rants. [daring]. dalam <http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-09-22/turkey-israel-business-boom-obscured-in-erdogan-rant-against-trade-partner> [diakses pada 19 Maret 2016].
- Bulukbasi, Suha, 1999. "Behind the Turkish-Israeli Alliance: A Turkish View", Journal of Palestine Studies, 29 (1): 21-35.
- Cagaptay, Soner dan Evans, Tyler, 2012. "The Unexpected Vitality of Turkish-Israeli Trade", The Washington Institute for Near East Policy, No.16, hal 1-8.
- Cohen, Matthew S., 2014. "Breakdown and Possible Restart: Turkish-Israeli Relations under AKP", Israel Journal of Foreign Affairs VIII: 1, hal 39-55.

- Cornel, Svante E., t.t. "Pakistan's Foreign Policy: Islamic or Pragmatic?" dalam Shaffer, Brenda (ed.), 2006. *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy*. Cambridge: The MIT Press. Ch.11.
- Ehin, Piret dan Berg, Eiki, 2009. *Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relation and European Integration*. Cornwall: MPG Books Ltd.
- Eichner, Itamar, 2012. Turkish Tourism Official Invites Israeli Tourists to Come Back [daring]. dalam <http://www.al-monitor.com/pulse/iw/business/2012/03/turkey-misses-israeli-tourists.html#ixzz43dQDL6Ja> [diakses pada 23 Maret 2016].
- Finnemore, Martha dan Sikkink, Kathryn, 2001. "Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics", *Annual Reviews*, 4: 391-416.
- Fischer, Markus, t.t. "Culture and Foreign Politics", dalam Shaffer, Brenda (ed.), 2006. *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy*. Cambridge: The MIT Press. Ch.2.
- Gokce, Dincer, 2010. "Turkish Tourism Agency Incurs Losses with Israeli Cancellations", *Hurriyet Daily News*, 28 Juni 2010. [daring]. dalam <http://www.hurriyetaidailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=tourism-agencies-in-loss-due-to-israeli-reaction-2010-06-28> [diakses pada 15 Februari 2016].
- Gullo, Matthew T., 2012. *Turkish Foreign Policy: Neo-Ottomanism 2.0 and the Future of Turkey's Relations with the West*. MA. Duke University.
- Hopf, Ted, 1998. "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", *International Security*, 23 (1): 171-200.
- Investment Support and Promotion Agency of The Republic of Turkey Prime Ministry, t.t. Foreign Trade. [daring]. dalam www.invest.gov.tr [diakses pada 3 Desember 2015].
- _____, 2014. Turkish Tourism Revenue Hits 32 Billion. [daring]. dalam <http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/news/Pages/310114-turkey-tourism-revenue-in-2013.aspx> [diakses pada 9 Desember 2015].

- Kangas, Roger, t.t. "Domestic Politics, Bureaucratic Strategies, and Culture in Central Asia", dalam Shaffer, Brenda (ed.), 2006. *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy*. Cambridge: The MIT Press. Ch.7.
- Prime Ministry Press Center of the Republic of Turkey, 2013. Press Statement: Statements concerning the phone call between Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and Israeli Prime Minister Netanyahu as agreed upon by the two sides. [daring]. dalam <http://www.bbm.gov.tr/Forms/pgNewsDetail.aspx?Type=1&Id=4543> [diakses pada 12 Februari 2016].
- Punsmann, Burcu Gultekin, 2011. "Turkey-Israel: Towards a Decoupling between Economics and Politics", Economic Policy Research Foundation of Turkey, N201148, hal 1-4.
- Ravid, Barak, 2011. "Turkey Clarifies: Trade Sanctions against Israel Include Only Defense Industry", Haaretz, 6 September 2011. [daring]. dalam <http://www.haaretz.com/israel-news/turkey-clarifies-trade-sanctions-against-israel-include-only-defense-industry-1.382917> [diakses pada 16 Februari 2016].
- Setrakian, Lara, 2011. Did Turkey Turn On Israel to Boost Business from the Arab World? [daring]. dalam <http://www.businessinsider.com/did-turkey-turn-on-israel-to-boost-business-from-the-arab-world-2011-9?IR=T&r=US&IR=T> [diakses pada 20 Maret 2016].
- Shaffer, Brenda, 2006. *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy*. Cambridge: The MIT Press.
- Slot, Rune, 2013. Turkey's Foreign Policy. [daring] dalam: <http://rudar.ruc.dk/handle/1800/10620> [diakses pada 18 Maret 2016].
- Stein, Aaron, 2014. "Turkish New Foreign Policy: Davutoglu, the AKP, and the Pursuit of Regional Order", Royal United Services for Defence and Security Studies, Whitehall Paper No. 83.
- TurkStat, 2015a. Export by Country and Year: Top 20 Country in Exports. [daring]. dalam www.turkstat.gov.tr [diakses pada 4

Desember 2015].

Uiportal, 2013. Disintegration of Diplomatic Relations and economic Relations between Turkey and Israel. [daring]. dalam <http://www.uiportal.net/disintegration-of-diplomatic-relations-and-economic-relations-between-turkey-and-israel.html>[diakses pada 3 Desember 2015].

VOA News, 2011. "Turkey Suspends Trade, Defense Ties with Israel", VOA News, 5 September 2011. [daring]. dalam <http://www.voanews.com/a/turkey-suspends-trade-defense-ties-with-israel--129290663/144833.html> [diakses pada 16 Februari 2016].

World Bank, t.t. Turkey Overview. [daring]. dalam www.worldbank.org/en/country/turkey/overview [diakses pada 3 Desember 2015].

Yinanc, Barcin, 2012. "Top Bosses Eye Smart Investments", Hurriyet Daily News, 21 Maret 2013. [daring]. dalam <http://www.hurriyetdailynews.com/top-bosses-eye-smart-investments.aspx?pageID=238&nID=16499&NewsCatID=345>[diakses pada 22 Maret 2016].

Zorlu, t.t. Energy. [daring]. dalam <http://www.zorlu.com.tr/en/fields-of-operation/energy> [diakses pada 20 Maret 2016].

